



14
februari
2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIS

TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada semua pihak di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang. Laporan Kinerja (LKj) ini mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 oleh masing-masing subbagian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Sebagai manfaat untuk internal kami, Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat. Serta, sebagai manfaat untuk publik Laporan Kinerja (Lkj) ini dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang kepada masyarakat.

Diharapkan dengan adanya LKj Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 ini terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik perbaikan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dimasa yang akan datang

sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi untuk meningkatkan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel

Pandeglang, 25 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Sekretaris,



MOHAMAD RUKBI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 secara singkat memuat gambaran semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2023 sebagai perwujudan dari visi, misi tujuan dan Sasaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pandeglang. Penyusunan LKj Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023 sebagai upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Dalam rangka mengaktualisasikan visi Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang yaitu: “Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”, maka selaras dengan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
5. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel. Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui penetapan kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang selama Tahun 2023 pada prinsipnya menyesuaikan dengan Rencana Strategis. Dari kegiatan yang dilaksanakan, capaian indikator, masukan, keluaran dan hasil sebagai manifestasi dari pencapaian kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKNG	1
	B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
	C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
	D. DASAR HUKUM	5
	E. SUMBERDAYA MANUSIA	6
	F. STRUKTUR ORGANISASI	7
	G. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	15
	H. PERMASALAHAN UTAMA	16
	I. SISTEMATIKA	18
BAB II	PERENCANAAN KINERJA TAHU 2023	19
	A. SASARAN RPJMN 2020-2024	19
	B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023	22
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	28
	A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	28
	B. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	29
	C. AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN	34
BAB IV	PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Pandeglang sebagai bagian hierarkis dari KPU RI dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). LKj KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5 / PR.03- 1 – Kpts / 03 / KPU / I / 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN dan APBD. Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pandeglang selama Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2023 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Pandeglang selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui Media Laporan Kinerja. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 adalah ;

1. Mempertanggungjawabkan kinerja KPU Kabupaten Pandeglang kepada KPU Provinsi Banten dan KPU RI serta pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas;
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal KPU Kabupaten Pandeglang

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Menurut Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat(5) disebutkan:“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis”. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksanan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkatpusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang sifatnya hierarkis dan tetap. Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 88 Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administrasi;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang dalam hal sebagai berikut :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten / Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten / Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. DASAR HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor : B/3934/M. d. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
- g. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- h. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum.
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari, maka Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Adapun jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang sebanyak 24 (dua puluh empat)

orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu) Orang Sekretaris, 4 (Empat) Orang Kasubag 7 (tujuh) pegawai berstatus sebagai Apartur Sipil Negara (ASN) dan 12 (dua belas) pegawai berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Berdasarkan Pendidikan terakhir kedudukan dari jumlah keseluruhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang tidak mengalami perubahan meskipun mengalami 1 (satu) kali perombakan di bulan Oktober Tahun 2023.

*Tabel 1. Kedudukan Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang
 (Bulan Januari – Desember Tahun 2023)*

No	Jabatan	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sekretaris								1		1
2	Kepala Sub Bagian							3	1		4
3	ASN			6				1			7
4	PPNPN			8			1	3			12

F. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Tugas Pokok seta fungsi dilingkungan KPU Kabupaten Pandeglang sangat besar pengaruhnya terhadap Indikator Kinerja pada leading sektor di Sub Bagian BidangPasal masing-masing. 232 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas :

Tabel F.1. Pasal 232 PKPU Nomor 21 Tahun 2023



Tugas Pokok dan Fungsi tabel di atas dapat dilihat pada uraian sebagaimana dibawah ini :

a). Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik ;

1. Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
2. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kab/Kota;
3. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
4. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/KPAK);
5. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
6. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi
7. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
8. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa
9. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
10. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pajabat penandatanganan SPM;

12. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
13. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
14. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
15. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
16. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
17. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b) Sub. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;

1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kab/Kota;
2. Menyusun draf pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota;
3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Penggantian Antar Waktu dan pengisian Anggota DPRD Kab/Kota;
6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
8. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
10. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
11. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
12. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
13. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
15. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota; 16. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
17. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;
18. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c) Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
3. Mengelola, menyusun data pemilih;
4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait;
5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintah;
6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggaraan Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
10. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
14. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kab/Kota;

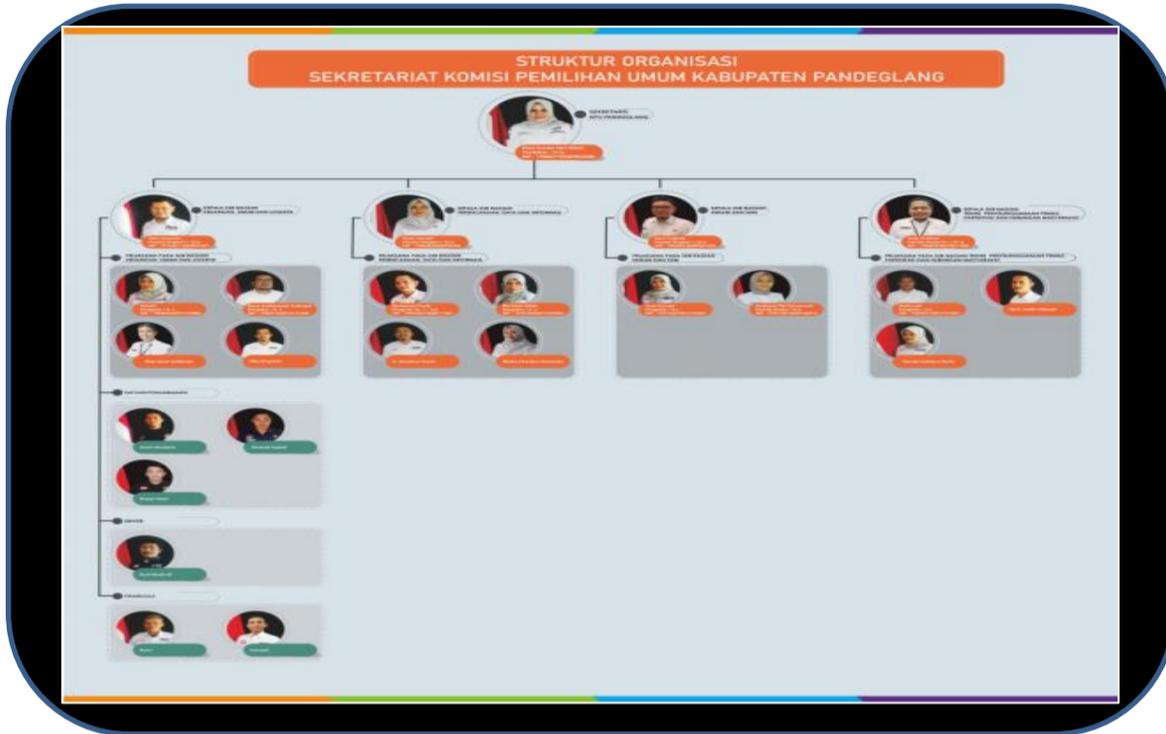
15. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
16. Menjalankan perintah lain yang diperintahkan pimpinan.

d) Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;

1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum Penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
5. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
6. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
7. Menyusun dan mengelola verifikasi Calon Anggota DPRD Kab/Kota;
8. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
9. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;

10. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
11. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
12. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian hukum;
13. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
14. Menyusun dan mencari bahan dan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
15. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
17. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Hukum Kab/Kota;
18. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
19. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**Tabel 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang
(Bulan Januari – Oktober Tahun 2023)**



**Tabel 3. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang
(Bulan Oktober – Desember Tahun 2023)**



G. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2020-2024. Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja utama pada tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan program-program dan kebijakan yang ditetapkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebijakan - kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah:

- ***Pencanangan Zona Integritas***

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari strategis pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemerintah telah giat berupaya untuk mencegah pemberantasan korupsi dengan berbagai strategi yang sangat jelas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025.

Gambar : Pencangan Zona Integritas



- **Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap system penyelenggaraan Pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desing Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan terciptanya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Gambar : Pencangan Zona Integritas



H. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Adapun dalam proses perjalanannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic issued), yaitu :

- a) Organisasi dan personil kesekretariatan belum sepenuhnya dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- b) Kurang optimalnya perencanaan anggaran dan kegiatan, sehingga banyak melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
- c) Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi.
- d) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada efisiensi kinerja organisasi.
- e) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- f) Terbatasnya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagian besarnya merupakan tenaga Pegawai Non Pegawai Negeri, hal ini menimbulkan ketergantungan oleh karena Status Kontrak.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LAPKIN Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Akuntabilitas Kinerja

Merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai Target.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

A. SASARAN RPJMN TAHUN 2020-2024

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Republik Indonesia menyusun keputusan yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 untuk kemudian diadopsi menjadi Rencana Strategis KPU Kabupaten Pandeglang. Penyusunan LKj ini sebagai kewajiban dalam upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja KPU Kabupaten Pandeglang yang telah dilakukan selama tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah mengatur mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Berdasarkan pada peraturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga dimandatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga

(Renstra K/L). Dokumen Renstra K/L tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu lembaga mandiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Upaya dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020- 2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra KPU ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun, yaitu 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah: “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional, dan berintegritas adalah sebagai berikut ;

- a) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- b) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- c) Professional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU Periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu;
- b) Menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak;
- e) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu serentak;
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan

diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Kabupaten Pandeglang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu/pemilihan;
- b) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu/pemilihan;
- c) Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

KPU Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024. Untuk menentukan Rencana Kinerja Tahun 2023 KPU Kabupaten Pandeglang merumuskan IKU Tahun 2022 sebagai berikut: Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian Target kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Tabel B.1. Indikator Kinerja Utama Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET
Sasaran 1 : Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	
Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang yang berbasis Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)	80%
Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	
Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%
Sasaran 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	
Indeks Reformasi Birokrasi	75
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
Sasaran 4 : Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%
Persentase KPU Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	80%
Sasaran 5 : Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	
Jumlah pusat pendidikan pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Pandeglang	1 Lokasi
Persentase “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	100%
Persentase “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih perempuan	95%
Sasaran 6 : Terwujudnya koordinasi penyelenggara kepemiluan yang sesuai dengan standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten Pandeglang	100%
Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data pemilih	100%
Persentase KPU Kabupaten Pandeglang yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Tabel B.1. Perjanjian Kinerja Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 Kali
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80%
4	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
5	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih	100%

Tabel B.2. Perjanjian Kinerja Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	80%
2	Meningkatnya tertib administrasi dan Pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%
3	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	35 Kec
4	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Menyusun Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	80%

Tabel B.3. Perjanjian Kinerja Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
2	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%
3	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
4	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dengan patuh dan tertib	98%
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,50%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%
6	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%
7	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
		Persentase Gedung dan Gudang dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72%

1	2	3	4
8	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data, kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Penyelenggaraan pemilu/pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
		Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan pemilu /pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase pendistribusian logistik pemilu/pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
		Persentase Menginventarisir dan memelihara logistik pemilu/pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pengumutan suara dalam pemilu/pemilihan	100%

Tabel B.4. Perjanjian Kinerja Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%
		Persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%
2	Terlaksanananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
3	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
4	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Melaksanakan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	1 Satker
5	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Melaksanakan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	100%

1	2	3	4
6	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Melaksanakan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih Perempuan	100%
		Melaksanakan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih Pemilih Pemula	100%
		Melaksanakan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk pemilih Pemilih Disabilitas	100%
7	Meningkatnya Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
8	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	90%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Rencana Aksi Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang. Rencana kinerja yang diharapkan dapat merealisasikan kinerja sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penjanjian kinerja KPU Kabupaten Pandeglang tahun 2023.

Pada hakekatnya, sebagai lembaga yang hirarkis, rencana kinerja KPU Kabupaten Pandeglang merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan kinerja KPU Republik Indonesia. Realisasi Rencana Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang Tahun Tahun 2023, merupakan pelaksanaan dari Sasaran Strategis, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja yang telah diamanatkan dalam Renstra KPU RI, KPU Provinsi Banten dan Renstra KPU Kabupaten Pandeglang tahun 2020 – 2024.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut merupakan satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya.

B. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Rencana aksi kinerja merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang melalui Rencana Aksi Kinerja Tahunan Tahun 2023 menentukan indikator- indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan petaksanaan program /kegiatan di masa yang akan datang. Kinerja KPU Kota Madiun Tahun 2021, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses, pencapaian kinerja per-satuan / perodik dikegiatan di Tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. sebagaimana terangkum pada periode di bawah ini.

Tabel B.1. Rencana Aksi Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Nama Kegiatan / Aksi	Pelaksanaan / Kegiatan Triwulan			
				I	II	III	IV
	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peratura Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Hukum dalam penyelenggaraan pemilu melalui rapat dengan Parpol peserta Pemilu	Pelayanan administrasi hukum dalam penyelenggaraan pemilu kepada parpol peserta pemilu				
		Terdokumentasikannya seluruh produk hukum	Melakukan pendokumentasian dan menyampaikan informasi produk hukum				

Dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Pandeglang harus menetapkan keputusan dengan batas waktu yang ditentukan oleh aturan dan regulasi yang mengatur tentang tahapan Pemilu. Keterlambatan waktu dan ketidaksesuaian dengan regulasi tentu menjadi potensi sengketa dan pelanggaran administrasi pemilu, bahkan bisa menjadi pelanggaran kode etik karena ketidak profesionalan KPU Kabupaten Pandeglang sebagai penyelenggara.

Tabel 3.2. Rencana Aksi Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Nama Kegiatan / Aksi	Pelaksanaan / Kegiatan Triwulan			
				I	II	III	IV
2	Fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu kada, publikasi dan sarana fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan Wakil presiden, pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW	Terselenggaranya Pendidikan Pemilih, Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Melakukan FGD dengan stake holders terkait Pendidikan Pemilih kepada Daerah partisipasi Rendah, Daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan Daerah rawan konflik/Bencana				
		Terdokumentasikannya Dokumen dan arsip Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Mendokumentasikan arsip dan dokumen teknis Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden				
		Terselenggaranya Publikasi informasi Publik	Penerbitan bahan informasi dan kliping kepemiluan dan Pilkada				

Sasaran program terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Pandeglang dengan indikator persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik merupakan salah satu kebutuhan vital dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Adanya sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai kebutuhan saat ini akan mempermudah para pegawai menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki KPU Kabupaten Pandeglang sudah memadai untuk saat ini. Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang dalam penyediaan sarana dan prasarana yang berfungsi baik :

1. Menyusun kebutuhan rumah tangga kantor;
2. Menginventarisir peralatan kantor yang tidak dapat berfungsi dengan baik untuk diperbaiki;
3. Menjalin komunikasi kepada seluruh personel untuk mengetahui kebutuhan kerja masing-masing;
4. Menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

Salah satu indikator penting sebagai pendukung dalam Proses pelaksanaan tahapan kepemiluan adalah kesiapan Fasilitasi / Sarana dan Prasarana. KPU Kabupaten Pandeglang sangat memperhatikan hal tersebut sebagai langkah penunjang partisipasi masyarakat,

mengangkat partisipasi pemilih yang rendah bekerjasama / dukungan Stake Holder yang bersama-sama menjalankan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kepemiluan karena Fasilitasi / Sarana dan Prasarana demi terselenggaranya kesuksesan pemilu.

Tabel 3.3. Rencana Aksi Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Nama Kegiatan / Aksi	Pelaksanaan / Kegiatan Triwulan			
				I	II	III	IV
3	pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU	Terselenggarakannya layanan perkantoran dan pembayaran Gaji dan Tunjangan	Pelayanan Perkantoran dalam pembayaran gaji dan tunjangan				
		Terseenggarakannya pengawasan internal dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran LPPA tepat waktu	Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan				
		Terselenggarakannya Laporan Sistem Akuntabilitas dan pelaporan keuangan Pemilu Tingkat UAKPA dan UAPPA-W	Pengelolaan laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W				

Pengelolaan adminitrasi dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang berhubungan langsung dengan sistem administrasi dalam ruang lingkup di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang dan salah satu bagian manajemen yang memberikan informasi sesuai dengan bidang administrasi yang dibutuhkan guna menunjang produk laporan keuangan yang efektif. Sedangkan upaya KPU Kabupaten Pandeglang dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, antara lain :

1. Menjalankan manajemen pengelolaan keuangan yang baik dengan implementasi SPIP;
2. Menyelesaikan rekomendasi BPKP dan Inspektorat KPU dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
3. Menyiapkan data keuangan yang valid, tepat, dan akurat;
4. Melakukan pencatatan yang terperinci ke dalam buku kas dan buku pembantu lainnya;
5. Melakukan prinsip efektif dan efisien terhadap belanja-belanja perjalanan dinas;

Tabel 3.4. Rencana Aksi Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Nama Kegiatan / Aksi	Pelaksanaan / Kegiatan Triwulan			
				I	II	III	IV
4	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Data	Terselenggaranya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih	Pemutakhiran Data Pemilu				
		Terselenggaranya Monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran KPU Tahun 2023	Monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran KPU Tahun 2023				
		Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dan perjanjian Kinerja Tahun 2023				
		Terselenggaranya penyusunan dokumen rencana kerja anggaran Tahun 2023	Rapat kerja dengan KPU Provinsi terkait dokumen rencana kerja dan anggaran Tahun 2023 dan evaluasi kinerja				
		Terselenggaranya koordinasi ke Kanwil/KPPN/KPKNL dalam pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran Ta 2023	Kordinasi ke Kanwil/KPPN/KPKNL dalam pengelolaan program dan kegiatan serta anggaran Ta 2023				

Dapat dikatakan sebagai bagian yang sangat vital dilingkungan KPU Kabupaten Pandeglang sebagai bidang perencanaan, analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi dilingkungan KPU Kabupaten Pandeglang. Untuk mendukung capaian sasaran program KPU Kabupaten Pandeglang tahun 2023, maka komitmen untuk menjalankan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dirancang dan ditetapkan harus terkait dengan sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui sasaran dan indikator tersebut, KPU Kabupaten Pandeglang berkomitmen untuk memperbarui data pemilih sehingga mempermudah proses pemutakhiran data pemilih saat Tahapan Pemilu/Pemilihan. Proses rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan dilaksanakan setiap bulan.

Tabel 3.5. Rencana Aksi Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Nama Kegiatan / Aksi	Pelaksanaan / Kegiatan Triwulan			
				I	II	III	IV
5	Layanan Perkantoran	Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan kantor	Belanja keperluan perkantoran				
		Terselenggaranya pengelolaan BMN	Penatausahaan BMN melalui laporan Simak BMN persediaan				

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan kebutuhan operasional dan pemeliharaan perkantoran KPU yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan perkantoran. Target sasaran dari kegiatan tersebut. Dengan demikian segala bentuk penyelenggaraan baik pengelolaan BMN dan pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana perkantoran. pelayanan perkantoran dilaksanakan selama satu tahun untuk menjamin kenyamanan lingkungan kerja di KPU Kabupaten Pandeglang. Pemenuhan kebutuhan perkantoran yaitu berupa pembayaran honorarium, pemeliharaan kendaraan dinas dan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan halaman kantor, serta pembayaran jasa listrik, telepon dan internet. Untuk mendukung kegiatan tersebut juga dilakukan pengadaan peralatan dan fasilitas pekantoran melalui belanja modal.

Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang telah melakukan pemeliharaan terhadap logistik Pemilu/Pemilihan. Pemeliharaan dilakukan agar logistik Pemilu/ Pemilihan yang belum bisa dilelang dan dimusnahkan tersebut dapat diamankan dengan baik. Proses pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dalam hal penginventarisasian logistik, Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan penginventarisasian atas logistik Pemilu/Pemilihan yang dilakukan dengan membentuk tim stock opname. Tim inilah yang melakukan penginventarisasian atas kondisi logistik KPU. Proses penginventarisasian telah dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Pemeliharaan dan penginventarisasian logistik pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang dilaksanakan dengan selalu melakukan koordinasi dengan KPU

Provinsi Banten. Hal ini dilakukan agar setiap proses yang dijalankan telah sesuai dengan SOP dan dapat dimonitor oleh KPU Provinsi Banten maupun dari KPU RI.

Tabel 3.6. Rencana Aksi Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Nama Kegiatan / Aksi	Pelaksanaan / Kegiatan Triwulan			
				I	II	III	IV
6	Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU	Laporan hasil Review Laporan keuangan	Laporan hasil review Laporan keuangan				
		Terselenggaranya sistem pengendalian Terselenggaranya sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Terselenggaranya sistem pengendalian Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota				

KPU Kabupaten Pandeglang sebagai lembaga yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.7. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Data Pemilih Yang Terkini	Presentase KPU Kabupaten Pandeglang yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
2.	Terwujud Tahapan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Presentase Kabupaten Pandeglang Yang Penyelenggarakan Pemilu / Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Presentase Keberhasilan distribusi Logistik Pemilu / Pemilihan secara Tepat jumlah tepat jenis tepat Mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten Pandeglang	100%
4.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkopeten	Presentase kesesuaian kompetensi Pegawai terhadap standar Kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Pandeglang	100%
5.	Terwujudnya dukungan Sarana dan prasarana Guna meningkatkan Kelancaran tugas KPU	Presentase tersedianya sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
6.	Tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi hukum sesuai Peraturan perundang-Undangan	Presentase Rancangan Keputusan kabupaten yang Di susun dan di harmonisasi Dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Meningkatnya kualitas Pelayanan, pengelolaan Dokumentasi dan informasi hukum	Presentase produk hukum yang Di kelola dan di dokumentasikan Sesuai peraturan perundang-Undangan oleh KPU kabupaten Pandeglang	100%
		Presentase informasi produk Hukum yang di sajikan secara Cepat, tepat, dan akurat sesuai Dengan SOP oleh KPU kabupaten Pandeglang	94%
8.	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan Dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU kabupaten pandeglang	B
		Persentase opini BPK atas Laporan keuangan KPU Kabupaten pandeglang	WTP
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten pandeglang	79
		Presentase unit kerja yang telah Melaksanakan pembangunan zona Integritas menuju WBK/WBBM di KPU kabupaten pandeglang	75%
		Persentase KPU kabupaten Pandeglang yang laporan Keuangan sesuai dengan SAP	100%
9.	Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	Presentase Penyelesaian Permasalahn dalam pengelolaan Keuangan pada satker KPU Kabupaten Pandeglang	90%
		Presentasi jumlah KPU Kabupaten Pandeglang yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid	100%
10.	Terwujudnya Kerjasama Dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah fasilitas Kerjasama KPU Kabupaten Pandeglang Dengan Instansi terkait dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 Kegiatan
11.	Terwujudnya rencana Kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Efektif dan efisien	Jumlah rrevisi yang di lakukan KPU Kabupaten Pandeglang terhadap Rencana kerja yang telah Ditetapkan	10 Kali
12.	Terwujudnya Sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib. Efektif dan efisien	Presentase Laporan monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara Akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Pandeglang	75%
		Presentase tercapainya target Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang yang sesuai dengan Perjanjian kinerja	90%

1.	Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi demokrasi	Rp.	34,466,663,000
2.	Program dukungan menejemen	Rp.	2,641,501,000
3.	jumlah	Rp.	37,107,864,000

Analisis sebagai tercapainya sasaran strategis pada perjanjian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang tahun 2023 secara menyeluruh adalah bentuk realisasi dari pernyataan-pernyataan sebelumnya dalam indikator kinerja KPU Kabupaten Pandeglang tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis serta turut mendukung tercapainya sasaran strategis sebagaimana analisis dibawah ini :

Prosedur dimulai saat DP4 yang diterima baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Luar Negeri disinkronisasi dengan data pemilih terakhir yang dimiliki KPU, untuk kemudian diturunkan kepada KPU Kabupaten/Kota seIndonesia untuk dikonsolidasikan dengan seluruh Pantarlih. Pantarlih kemudian melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) berbasis sinkronisasi data dari rumah ke rumah, pintu ke pintu, sejak 14 Februari s/d 16 Maret 2023. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 jo Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan berbasis *de jure*, artinya didaftarkan sebagai pemilih sesuai data pada dokumen kependudukan masing-masing pemilih. Prosedur tersebut sejalan dengan kebijakan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Pemerintah. Sementara itu, untuk menjamin keberadaan pemilih yang tidak memungkinkan menggunakan hak pilihnya secara *de jure* dan terkonsentrasi pada suatu lokasi, antara lain seperti lembaga pelayan masyarakat/rumah tahanan, panti sosial, panti rehabilitasi, dan lokasi bencana/konflik, maka KPU mengeluarkan kebijakan pengelolaan pendataan pemilih di lokasi khusus. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU juga melaksanakan ketentuan peraturan lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Ditjen Dukcapil yang mewajibkan seluruh lembaga yang telah diberikan hak akses terhadap data kependudukan untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data kependudukan dengan mendorong penerapan Zero Sharing Data Policy.

Sesuai dengan amanat Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022, pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan asas dan prinsip pemilihan umum. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 akan berjalan sesuai dengan jadwal. Adanya isu penundaan Pemilu yang santer beredar beberapa waktu lalu terbantahkan dengan adanya tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 yang sudah disepakati. Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 167 ayat (8) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Logistik dan keuangan merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), maka dibutuhkan suatu tata kelola yang baik agar agenda demokrasi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Permasalahan logistik yang sering terjadi di Pemilu belakangan ini adalah menyangkut masalah penatausahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparansi dan akuntabel. Antara pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara dengan pengelolaan

dan pertanggungjawaban keuangan komisi pemilihan umum memiliki hubungan yang sangat jelas. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara menjadi kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan komisi pemilihan umum. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: telaah dokumen, observasi dan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris, Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, staf, dan operator. Hasilnya ialah pengelolaan barang milik negara yang didalamnya termasuk logistik pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung tengah sudah cukup baik, ini terlihat dengan sudah terdistribusinya logistik petugas pantarlih untuk tahapan cokit pemilu tahun 2024. Namun perlu beberapa perbaikan dan penguatan disektor sumber daya manusia serta infrastruktur gudang agar pemilu serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan jadwal tahapan, sehingga cita-cita kita bersama untuk menghasilkan pemilu serentak tahun 2024 yang sukses baik itu penyelenggaraannya maupun pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.

Kunci keberhasilan pencapaian kinerja adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada suatu organisasi indikator yang dapat mempengaruhi kapasitas sumber daya manusia (SDM) antara lain, pendidikan, pelatihan dan pengalaman apabila terdapat perubahan peraturan yang menyangkut bidang teknis setiap pegawai harus mengetahui. Oleh karena pendidikan dan pelatihan hanya bisa dihadiri oleh setiap pegawai yang mendapat kesempatan, maka dari itu setiap ilmu yang diperoleh harus ditularkan ke pegawai yang belum mendapat kesempatan tersebut.

Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya adalah sarana penunjang yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi kegiatan pelayanan, tugas dan administrasi sebuah organisasi khususnya pada penyelenggaraan pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Pandeglang. Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang memadai akan meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Pandeglang yang menangani urusan Kepemiluan. Untuk memenuhi kebutuhan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya kantor.

- 1). Maksud dan tujuan pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya adalah untuk menunjang kebutuhan kerja KPU Kabupaten Pandeglang dengan harapan agar dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga dapat memenuhi target kinerja organisasi yang sudah ditetapkan.
- 2). Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya KPU Kabupaten Pandeglang tahun 2023.

KPU Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan amanat konstitusi sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilu serta pemilihan kepala daerah telah membuat sebuah aturan yang dijadikan sebagai rujukan dan pedoman dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah, tetapi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan tersebut aspek yuridis dan hierarki perundang-undangan.

KPU Kabupaten Pandeglang berusaha maksimal melaksanakan pecaangan Zona Integritas yang digunakan sebagai strategi percepatan Reformasi Birokrasi, melalui pembangunan unit kerja percontohan (Role model) semaksimal mungkin yang bebas dan dari korupsi dan memiliki pelayanan yang prima. Fokus pembangunan unit kerja Zona Integritas diharapkan dapat membangun budaya anti korupsi dan mampu memberikan pelayanan prima yang dampaknya dapat langsung dinikmati oleh stakeholder internal dan eksternal. Sehingga pembangunan Zona Integritas di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Pandeglang merupakan satu bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai prasyarat utama pembangunan nasional. Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, KPU Kabupaten Pandeglang ditahun anggaran 2023 berhasil menyusun Laporan Keuangan KPU Kabupaten Pandeglang berbasis aplikasi sebagai kemajuan signifikan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara sesuai best practices akuntansi pemerintahan secara nasional.

KPU Kabupaten Pandeglang memberikan perhatian terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU) sebagai suatu badan khusus yang di bentuk bersama untuk merencanakan, memprogramkan dan melaksanakan Pemilu dan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pandeglang. Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara, KPU misalnya, dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada UUD, UU, PKPU, Peraturan DKPP dan Bawaslu agar pelaksanaan tugas dan fungsi memiliki kepastian hukum. Penyelenggara Pemilu harus jelas dan terang kebijakannya, tidak ada kebijakan yang mengambang dan tidak berkepastian hukum maka dari itu, pentingnya penguatan kelembagaan dengan bekerjasama antar lembaga.

C. AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari alokasi penggunaan anggaran, pada pelaporan keuangan KPU Kabupaten Pandeglang menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang mana sistem ini mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satker dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pelaporan. Selain dari aplikasi tersebut KPU Kabupaten Pandeglang terhubung secara langsung dengan aplikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan E-Monev Bappenas. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh realisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang pelaporan selama Triwulan pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Prinsip pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar untuk mencapai akuntabilitas, KPU Kabupaten sebagai penyelenggara serta pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya. serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan pada setiap pelaporan keuangan merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) maka dibutuhkan suatu tata kelola yang baik agar agenda demokrasi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Adapun bentuk Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan hasil penilaian aplikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bappenas dapat tersaji sebagaimana dibawah ini :

Laporan Pengendalian E-Money Pertriwulan
Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2023

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN I (KUMULATIF)

Tahun : 2023

K/L : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM

UK. Eselon I: 01 - Komisi Pemilihan Umum

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
1	001 Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Gaji dan Tunjangan KPU Kabupaten Pandeglang	32.00	Layanan	1	0	1 Gaji dan Tunjangan	2.196.940.000	472.330.896	21.50%	Belum	Tidak Ada Masalah	Gaji dan Tunjangan KPU Kabupaten Pandeglang
3355.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan														
2	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Layanan Manajemen Keuangan	32.00	Layanan	1	0		38.214.000	1.940.000	5.08%	Belum	Tidak Ada Masalah	Layanan Manajemen Keuangan
3360.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
3	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	40.00	Layanan	1	0		41.500.000	9.174.500	22.11%	Belum	Tidak Ada Masalah	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
6634.EBA.963 - Layanan Data dan Informasi														
4	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Perencanaan	Layanan Data dan Informasi	10.99	Layanan	1	0		8.340.000	5.900.000	70.74%	Belum	Tidak Ada Masalah	Layanan Data dan Informasi
6709.QGE.001 - Perencanaan dan Penganggaran Pemilu														
5	111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Pelaksanaan	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	37.00	Satker	1	0		256.348.000	128.157.100	49.99%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu
6	113 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	Pelaksanaan	Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	46.00	Satker	1	0		610.462.000	53.143.300	8.71%	Belum	Tidak Ada Masalah	Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya
6709.QGE.003 - Fasilitasi Seleksi Laiton Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota														
7	111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Perencanaan	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1.00	Satker	1	0		1.000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
6709.QGE.004 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan														
8	111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Perencanaan	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	1.00	Satker	1	0		4.440.000	0	0.00%	Belum	Anggaran	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan
6709.QGE.006 - Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan														
9	111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Pelaksanaan	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	46.00	Satker	1	0		152.399.000	9.290.000	6.10%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan
6709.QGE.007 - Penyusunan Peraturan Pemilu														
10	113 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Pelaksanaan	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	46.00	Satker	1	0		8.007.000	740.000	9.24%	Belum	Anggaran	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
6709.RAN.001 - Sarana IT Pemilu														
11	110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Perencanaan	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.00	Satker	1	0		6.478.000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
6710.QGE.001 - Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu														
12	051 Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Pelaksanaan	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	44.00	Satker	1	0		193.307.000	179.000.000	92.60%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
6867.QGE.001 - Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc														
13	051 Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	Pelaksanaan	Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	50.00	Satker	1	0		1.749.986.000	1.526.696.000	87.24%	Belum	Tidak Ada Masalah	Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc
6867.QGE.002 - Honorarium Badan Adhoc														
14	051 Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	Pelaksanaan	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	50.00	Satker	1	0		41.527.150.000	7.346.150.000	17.69%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc
6867.QGE.003 - Dukungan Operasional Badan Adhoc														
15	051 Dukungan Operasional Badan Adhoc	Pelaksanaan	Dukungan Operasional Badan Adhoc	49.00	Satker	1	0		6.373.214.000	3.258.079.200	51.12%	Belum	Tidak Ada Masalah	Dukungan Operasional Badan Adhoc
6870.QGE.001 - Persiapan Kampanye Pemilu														
16	051 Persiapan Kampanye Pemilu	Perencanaan	Persiapan Kampanye Pemilu	1.00	Satker	1	0		19.959.000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Persiapan Kampanye Pemilu
6870.QGE.002 - Pengelolaan Kampanye Pemilu														
17	051 Pengelolaan Kampanye Pemilu	Perencanaan	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1.00	Satker	1	0		35.836.000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pengelolaan Kampanye Pemilu
6870.QGE.003 - Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu														
18	051 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	Perencanaan	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1.00	Satker	1	0		1.095.000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu
6871.QGE.001 - Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu														
19	051 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Pelaksanaan	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	48.00	Satker	1	3		1.412.625.000	8.842.000	0.63%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu
6871.QGE.002 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
20	051 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	51.00	Satker	1	3		2,285,910,000	8,990,000	0.39%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
6871.QGE.003 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik														
21	051 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Perencanaan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	Satker	1	0		96,101,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
6872.QGE.001 - Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
22	051 Fasilitas penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Pelaksanaan	Fasilitas penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	46.00	Satker	1	0		42,165,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Fasilitas penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara
6872.QGE.002 - Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
23	051 Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Perencanaan	Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1.00	Satker	1	0		191,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara
6872.QGE.003 - Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
24	051 Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	Perencanaan	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.00	Satker	1	0		95,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
6887.QGE.001 - Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih														
25	051 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Pelaksanaan	-Rapat Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Restrukturisasi Pada Pemilu Tahun 2024 tanggal 10 Februari 2023 -Rakor Persiapan Pengumuman Penetapan PPDP -Rakor Persiapan Coklit oleh Pantarlih dan Pelantikan Pantarlih 11 Februari 2023	58.00	Satker	1	0		20,809,000	11,204,500	53.84%	Belum	Anggaran	-Rapat Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Restrukturisasi Pada Pemilu Tahun 2024 tanggal 10 Februari 2023 -Rakor Persiapan Pengumuman Penetapan PPDP -Rakor Persiapan Coklit oleh Pantarlih dan Pelantikan Pantarlih 11 Februari 2023
6887.QGE.002 - Pemutakhiran Data Pemilih														
26	051 Pemutakhiran Data Pemilih	Pelaksanaan	Pemutakhiran Data Pemilih	53.00	Satker	1	3		138,070,000	0	0.00%	Sudah	Anggaran	Pemutakhiran Data Pemilih
6887.QGE.003 - Penetapan Data Pemilih														
27	051 Penetapan Data Pemilih	Pelaksanaan	Penetapan Data Pemilih	61.00	Satker	1	0		10,794,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Penetapan Data Pemilih
6889.QGE.001 - Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
28	051 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Pelaksanaan	Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	55.00	Satker	1	0		9,725,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
6889.QGE.002 - Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
29	051 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Pelaksanaan	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	57.00	Satker	1	0		12,875,000	8,189,000	63.60%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
6889.QGE.003 - Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
30	051 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Pelaksanaan	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	55.00	Satker	1	3		9,608,000	0	0.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
6890.QGE.001 - Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan														
31	051 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Pelaksanaan	Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	54.00	Satker	1	0	1 Kegiatan Pencalonan	94,775,000	53,354,500	56.30%	Belum	Tidak Ada Masalah	Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan
6890.QGE.002 - Pelaksanaan Proses Pencalonan														
32	051 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Perencanaan	Pelaksanaan Proses Pencalonan	1.00	Satker	1	0		134,539,000	1,110,000	0.83%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pelaksanaan Proses Pencalonan
6890.QGE.003 - Evaluasi Pencalonan														
33	051 Evaluasi Pencalonan	Perencanaan	Evaluasi Pencalonan	1.00	Satker	1	0		18,120,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Evaluasi Pencalonan

REKAP PELAPORAN KOMPONEN TRIWULAN II (KUMULATIF)														
Tahun : 2023														
K/L : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM														
UK. Eselon I: 01 - Komisi Pemilihan Umum														
NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
1	001 Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Gaji dan Tunjangan KPU kabupaten Pandeglang	62.00	Layanan	1	0	1 Gaji dan Tunjangan	2,196,940,000	1,163,274,454	52.95%	Belum	Tidak Ada Masalah	Gaji dan Tunjangan KPU kabupaten Pandeglang
3355.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan														
2	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Layanan Manajemen Keuangan	63.00	Layanan	1	1		38,214,000	10,110,000	26.46%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Layanan Manajemen Keuangan
3360.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
3	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	62.00	Layanan	1	1		41,500,000	26,491,800	63.84%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Operasional dan Pemeliharaan Kantor

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6634.EBA.963 - Layanan Data dan Informasi														
4	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Layanan Data dan Informasi	61.00	Layanan	1	1	8,340,000	5,900,000	70.74%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Layanan Data dan Informasi	
6709.QGE.001 - Perencanaan dan Penganggaran Pemilu														
5	111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Pelaksanaan	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	62.00	Satker	1	1	256,348,000	212,384,600	82.85%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	
6	113 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	Pelaksanaan	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	66.00	Satker	1	1	610,462,000	149,842,400	24.55%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	
6709.QGE.003 - Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota														
7	111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Pelaksanaan	Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	60.00	Satker	1	1	1,000	0	0.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	
6709.QGE.004 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan														
8	111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Pelaksanaan	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	61.00	Satker	1	1	4,440,000	2,391,300	53.86%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	
6709.QGE.006 - Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan														
9	111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Pelaksanaan	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	60.00	Satker	1	1	152,399,000	9,290,000	6.10%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	
6709.QGE.007 - Penyusunan Peraturan Pemilu														
10	112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Pelaksanaan	Penyusunan Peraturan Pemilu	52.00	Satker	1	1	8,007,000	3,070,000	38.34%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Penyusunan Peraturan Pemilu	
6709.RAN.001 - Sarana IT Pemilu														
11	110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Pelaksanaan	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	72.00	Satker	1	1	6,478,000	0	0.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
6710.QGE.001 - Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu														
12	051 Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Pelaksanaan	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	70.00	Satker	1	1	193,307,000	186,121,000	96.28%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	
6867.QGE.001 - Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc														
13	051 Fasilitas Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	Pelaksanaan	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	61.00	Satker	1	1	1,749,986,000	1,749,986,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	
6867.QGE.002 - Honorarium Badan Adhoc														
14	051 Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	Pelaksanaan	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	61.00	Satker	1	1	41,527,150,000	20,499,850,000	49.36%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	
6867.QGE.003 - Dukungan Operasional Badan Adhoc														
15	051 Dukungan Operasional Badan Adhoc	Pelaksanaan	Dukungan Operasional Badan Adhoc	71.00	Satker	1	1	6,373,214,000	5,256,463,500	82.48%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Dukungan Operasional Badan Adhoc	
6870.QGE.001 - Persiapan Kampanye Pemilu														
16	051 Persiapan Kampanye Pemilu	Persiapan	Persiapan Kampanye Pemilu	25.99	Satker	1	0	19,959,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Persiapan Kampanye Pemilu	
6870.QGE.002 - Pengelolaan Kampanye Pemilu														
17	051 Pengelolaan Kampanye Pemilu	Persiapan	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	25.99	Satker	1	0	35,836,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	
6870.QGE.003 - Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu														
18	051 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	Persiapan	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	25.99	Satker	1	0	1,095,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	
6871.QGE.001 - Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu														
19	051 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Pelaksanaan	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	52.00	Satker	1	6	1,412,625,000	9,952,000	0.70%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	
6871.QGE.002 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
20	051 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	61.00	Satker	1	6	2,285,910,000	25,065,900	1.10%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
6871.QGE.003 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik														
21	051 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Persiapan	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	25.99	Satker	1	0	96,101,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	
6872.QGE.001 - Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
22	051 Fasilitas penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Pelaksanaan	-Rakor Penyiapan rumusan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu serentak tahun 2024 tanggal 26 Juni 2023	50.00	Satker	1	1	42,165,000	11,274,000	26.74%	Sudah	Tidak Ada Masalah	-Rakor Penyiapan rumusan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu serentak tahun 2024 tanggal 26 Juni 2023	
6872.QGE.002 - Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
23	051 Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Persiapan	Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	25.99	Satker	1	0	191,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	
6872.QGE.003 - Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
24	051 Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	Persiapan	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	25.99	Satker	1	0	95,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK RIII	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6887.QGE.001 - Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih														
25	051 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Pelaksanaan	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	60.00	Satker	1	1		20,809,000	17,160,500	82.47%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih
6887.QGE.002 - Pemutakhiran Data Pemilih														
26	051 Pemutakhiran Data Pemilih	Pelaksanaan	Pemutakhiran Data Pemilih	61.00	Satker	1	5		138,070,000	7,850,000	5.69%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Pemutakhiran Data Pemilih
6887.QGE.003 - Penetapan Data Pemilih														
27	051 Penetapan Data Pemilih	Pelaksanaan	-Rakor Konsolidasi data menuju DPT Pemilu 2024 tanggal 18 Juni 2023 -Rapat Pleno terbuka DPT Tk Kabupaten Pandeglang Tanggal 21 Juni 2023	63.00	Satker	1	1		10,794,000	10,655,000	98.71%	Sudah	Anggaran	-Rakor Konsolidasi data menuju DPT Pemilu 2024 tanggal 18 Juni 2023 -Rapat Pleno terbuka DPT Tk Kabupaten Pandeglang Tanggal 21 Juni 2023
6889.QGE.001 - Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
28	051 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Pelaksanaan	Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	61.00	Satker	1	1		9,725,000	4,790,000	49.25%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
6889.QGE.002 - Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
29	051 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Pelaksanaan	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	60.00	Satker	1	1		12,875,000	9,839,000	76.42%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
6889.QGE.003 - Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
30	051 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Pelaksanaan	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	61.00	Satker	1	6		9,608,000	5,550,000	57.76%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
6890.QGE.001 - Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan														
31	051 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Pelaksanaan	Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	61.00	Satker	1	1	1 Kegiatan Pencalonan	94,775,000	82,911,000	87.48%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan
6890.QGE.002 - Pelaksanaan Proses Pencalonan														
32	051 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Persiapan	-Verifikasi Administrasi terhadap Dokumen Persyaratan BAKALON Anggota DPRD Kab. Pandeglang Tanggal 15 Mei 2023	25.99	Satker	1	0		134,539,000	52,765,500	39.22%	Belum	Tidak Ada Masalah	-Verifikasi Administrasi terhadap Dokumen Persyaratan BAKALON Anggota DPRD Kab. Pandeglang Tanggal 15 Mei 2023
6890.QGE.003 - Evaluasi Pencalonan														
33	051 Evaluasi Pencalonan	Perencanaan	Evaluasi Pencalonan KPU Pandeglang	10.99	Satker	1	0		18,120,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Evaluasi Pencalonan KPU Pandeglang

REKAP PELAPORAN KOMPONEN														
TRIWULAN III (KUMULATIF)														
Tahun : 2023														
K/L : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM														
UK. Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum														
NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK RIII	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
1	001 Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Gaji dan Tunjangan	82.00	Layanan	1	1	1 Gaji dan Tunjangan	2,196,940,000	1,643,923,541	74.83%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Gaji dan Tunjangan
3355.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan														
2	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Layanan Manajemen Keuangan	83.00	Layanan	1	1		38,214,000	23,461,500	61.40%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Layanan Manajemen Keuangan
3360.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
3	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	82.00	Layanan	1	1		41,500,000	38,153,600	91.94%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
6634.EBA.963 - Layanan Data dan Informasi														
4	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Layanan Data dan Informasi	80.00	Layanan	1	1		8,340,000	5,900,000	70.74%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Layanan Data dan Informasi
6709.QGE.001 - Perencanaan dan Penganggaran Pemilu														
5	111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Pelaksanaan	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	81.00	Satker	1	1		256,348,000	232,746,500	90.79%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu
6	113 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	Pelaksanaan	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	88.00	Satker	1	1		610,462,000	251,600,400	41.21%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu



Laporan Kinerja Tahun 2023
Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK RIIL	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6709.QGE.003 - Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota														
7	111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Pelaksanaan	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	83.00	Satker	1	1		1,000	0	0.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
6709.QGE.004 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan														
8	111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Pelaksanaan	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	86.00	Satker	1	1		4,440,000	2,391,300	53.86%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan
6709.QGE.006 - Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan														
9	111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Pelaksanaan	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	83.00	Satker	1	1		152,399,000	125,697,000	82.48%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan
6709.QGE.007 - Penyusunan Peraturan Pemilu														
10	112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Pelaksanaan	Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	83.00	Satker	1	1		8,007,000	4,666,000	58.27%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu
6709.RAN.001 - Sarana IT Pemilu														
11	110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Pelaksanaan	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	80.00	Satker	1	1		6,478,000	0	0.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
6710.QGE.001 - Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu														
12	051 Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Pelaksanaan	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	83.00	Satker	1	1		193,307,000	191,311,000	98.97%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
6867.QGE.001 - Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc														
13	051 Fasilitas Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	Pelaksanaan	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	84.00	Satker	1	1		1,749,986,000	1,749,986,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc
6867.QGE.002 - Honorarium Badan Adhoc														
14	051 Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	Pelaksanaan	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	82.00	Satker	1	1		41,527,150,000	29,899,700,000	72.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc
6867.QGE.003 - Dukungan Operasional Badan Adhoc														
15	051 Dukungan Operasional Badan Adhoc	Pelaksanaan	Dukungan Operasional Badan Adhoc	85.00	Satker	1	1		6,373,214,000	6,152,713,500	96.54%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Dukungan Operasional Badan Adhoc
6870.QGE.001 - Persiapan Kampanye Pemilu														
16	051 Persiapan Kampanye Pemilu	Pelaksanaan	Persiapan Kampanye Pemilu	81.00	Satker	1	1		19,959,000	6,431,600	32.22%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Persiapan Kampanye Pemilu
6870.QGE.002 - Pengelolaan Kampanye Pemilu														
17	051 Pengelolaan Kampanye Pemilu	Pelaksanaan	Pengelolaan Kampanye Pemilu	73.00	Satker	1	0		35,836,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pengelolaan Kampanye Pemilu
6870.QGE.003 - Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu														
18	051 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	Pelaksanaan	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	74.00	Satker	1	0		1,095,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu
6871.QGE.001 - Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu														
19	051 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Pelaksanaan	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	85.00	Satker	1	6		1,412,625,000	13,137,000	0.93%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu
6871.QGE.002 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
20	051 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	86.00	Satker	1	6		2,285,910,000	134,642,300	5.89%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
6871.QGE.003 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik														
21	051 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Pelaksanaan	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	76.00	Satker	1	0		96,101,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pengelolaan Dokumentasi Logistik
6872.QGE.001 - Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
22	051 Fasilitas penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Pelaksanaan	Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	86.00	Satker	1	1		42,165,000	11,274,000	26.74%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
6872.QGE.002 - Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
23	051 Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Pelaksanaan	Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	76.00	Satker	1	0		191,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara
6872.QGE.003 - Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
24	051 Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	Pelaksanaan	Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	77.00	Satker	1	0		95,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
6887.QGE.001 - Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih														
25	051 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Pelaksanaan	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	83.00	Satker	1	1		20,809,000	18,430,500	88.57%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih
6887.QGE.002 - Pemutakhiran Data Pemilih														
26	051 Pemutakhiran Data Pemilih	Pelaksanaan	Pemutakhiran Data Pemilih	82.00	Satker	1	5		138,070,000	43,492,500	31.50%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Pemutakhiran Data Pemilih
6887.QGE.003 - Penetapan Data Pemilih														
27	051 Penetapan Data Pemilih	Pelaksanaan	Penetapan Data Pemilih	83.00	Satker	1	1		10,794,000	10,655,000	98.71%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Penetapan Data Pemilih

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK RIIL	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6889.QGE.001 - Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
28	051 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Pelaksanaan	Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	82.00	Satker	1	1	9,725,000	9,419,500	96.86%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	
6889.QGE.002 - Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
29	051 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Pelaksanaan	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	83.00	Satker	1	1	12,875,000	12,763,000	99.13%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	
6889.QGE.003 - Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
30	051 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Pelaksanaan	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	84.00	Satker	1	6	9,608,000	9,405,000	97.89%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	
6890.QGE.001 - Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan														
31	051 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Pelaksanaan	Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	84.00	Satker	1	1	1 Kegiatan Pencalonan	94,775,000	92,923,000	98.05%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan
6890.QGE.002 - Pelaksanaan Proses Pencalonan														
32	051 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Pelaksanaan	Pelaksanaan Proses Pencalonan	82.00	Satker	1	0	134,539,000	125,791,200	93.50%	Belum	Tidak Ada Masalah	Pelaksanaan Proses Pencalonan	
6890.QGE.003 - Evaluasi Pencalonan														
33	051 Evaluasi Pencalonan	Pelaksanaan	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	80.00	Satker	1	0	18,120,000	2,765,000	15.26%	Belum	Tidak Ada Masalah	Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	

Adapun Pelaporan penggunaan ketersediaan dana detail KPU Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2023 dan realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat secara golbal dibulan Desember Tahun 2023 melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana dibawah ini :

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 1 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	63,313,960,000	0	62,018,304,461	10,267,627,074	62,285,931,536	98.38 %	1,028,028,465
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	61,055,101,000	0	49,842,269,432	10,194,410,625	60,036,680,057	98.33 %	1,018,420,943
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,684,739,000	0	890,367,800	606,641,500	1,497,009,300	88.86 %	187,729,700
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1,678,261,000	0	887,228,800	606,641,500	1,493,870,300	89.01 %	184,390,700
QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1,061,690,000	0	721,698,500	208,739,900	930,438,400	87.64 %	131,251,600
111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	256,348,000	0	250,296,500	5,731,000	256,027,500	99.87 %	320,500
111.0A Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	223,508,000	0	217,456,500	5,731,000	223,187,500	99.86 %	320,500
521211 Belanja Bahan	24,174,000	0	20,495,000	3,679,000	24,174,000	100.00 %	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	43,500,000	0	43,500,000	0	43,500,000	100.00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85,019,000	0	82,646,500	2,052,000	84,698,500	99.62 %	320,500
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	69,015,000	0	69,015,000	0	69,015,000	100.00 %	0
111.0B Dukungan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	32,840,000	0	32,840,000	0	32,840,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	10,490,000	0	10,490,000	0	10,490,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,900,000	0	4,900,000	0	4,900,000	100.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,450,000	0	17,450,000	0	17,450,000	100.00 %	0
113 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	805,342,000	0	471,402,000	203,008,900	674,410,900	83.74 %	130,931,100
113.0A Dukungan Operasional Perkantoran	432,182,000	0	319,862,600	69,082,400	388,945,000	90.00 %	43,237,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	25,000,000	0	5,687,000	16,877,300	22,564,300	90.26 %	2,435,700
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	200,000	0	63,000	0	63,000	31.50 %	137,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	171,140,000	0	141,100,000	30,040,000	171,140,000	100.00 %	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	29,400,000	0	29,299,000	0	29,299,000	99.66 %	101,000
521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	410,000	0	410,000	0	410,000	100.00 %	0
522111 Belanja Langganan Listrik	36,307,000	0	24,346,900	10,407,200	34,754,100	95.72 %	1,552,900
522112 Belanja Langganan Telepon	1,000,000	0	505,500	45,500	551,000	55.10 %	449,000
522113 Belanja Langganan Air	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 2 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522191 Belanja Jasa Lainnya	36,175,000	0	30,889,600	2,419,300	33,308,900	92.08 %	2,866,100
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40,408,000	0	20,387,000	0	20,387,000	50.45 %	20,021,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66,982,000	0	42,797,100	8,943,100	51,740,200	77.24 %	15,241,800
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,060,000	0	24,377,500	350,000	24,727,500	98.67 %	332,500
113.TC Rapat Koordinasi Bidang Keuangan dan BMN	7,440,000	0	0	0	0	0.00 %	7,440,000
521211 Belanja Bahan	7,440,000	0	0	0	0	0.00 %	7,440,000
113.TD Tambahan Rev 6	40,855,000	0	2,000,000	30,250,000	32,250,000	78.94 %	8,605,000
521211 Belanja Bahan	8,000,000	0	0	0	0	0.00 %	8,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00 %	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,855,000	0	0	30,250,000	30,250,000	98.04 %	605,000
113.TJ Tambahan Revisi 7	180,145,000	0	5,168,000	103,676,500	108,844,500	60.42 %	71,300,500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	24,000,000	0	1,320,000	20,651,000	21,971,000	91.55 %	2,029,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	93.75 %	1,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	140,145,000	0	3,848,000	68,025,500	71,873,500	51.29 %	68,271,500
113.TP Tambahan Perencanaan	144,720,000	0	144,371,400	0	144,371,400	99.76 %	348,600
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	144,720,000	0	144,371,400	0	144,371,400	99.76 %	348,600
QGE.003 Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
111.OA Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521211 Belanja Bahan	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	4,440,000	0	2,391,300	0	2,391,300	53.86 %	2,048,700
111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	4,440,000	0	2,391,300	0	2,391,300	53.86 %	2,048,700
111.OA Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	4,440,000	0	2,391,300	0	2,391,300	53.86 %	2,048,700
521211 Belanja Bahan	2,000,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,440,000	0	2,391,300	0	2,391,300	98.00 %	48,700
QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	604,123,000	0	156,203,000	397,751,600	553,954,600	91.70 %	50,168,400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 3 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	604,123,000	0	156,203,000	397,751,600	553,954,600	91.70 %	50,168,400
111.OA Sosialisasi Tatap Muka	101,730,000	0	93,572,800	1,500,000	95,072,800	93.46 %	6,657,200
521211 Belanja Bahan	58,370,000	0	53,062,800	1,500,000	54,562,800	93.48 %	3,807,200
522141 Belanja Sewa	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	1,800,000	0	1,800,000	50.00 %	1,800,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,660,000	0	6,610,000	0	6,610,000	99.25 %	50,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32,100,000	0	32,100,000	0	32,100,000	100.00 %	0
111.OB Penyusunan Laporan	669,000	0	647,000	0	647,000	96.71 %	22,000
521211 Belanja Bahan	669,000	0	647,000	0	647,000	96.71 %	22,000
111.OC Biaya Dukungan Pelaksanaan Kirab di Kab/Kota:	50,000,000	0	49,983,200	0	49,983,200	99.97 %	16,800
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	50,000,000	0	49,983,200	0	49,983,200	99.97 %	16,800
111.TJ Tambahan Revisi 7	39,344,000	0	0	29,539,000	29,539,000	75.08 %	9,805,000
521211 Belanja Bahan	19,344,000	0	0	11,923,000	11,923,000	61.64 %	7,421,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000	0	0	17,616,000	17,616,000	88.08 %	2,384,000
111.TK ALAT PERAGA SOSIALISASI	147,050,000	0	0	145,587,600	145,587,600	99.01 %	1,462,400
521211 Belanja Bahan	147,050,000	0	0	145,587,600	145,587,600	99.01 %	1,462,400
111.TL SOSIALISASI GEREPEG LEMBUR	67,100,000	0	0	65,400,000	65,400,000	97.47 %	1,700,000
521211 Belanja Bahan	43,100,000	0	0	42,800,000	42,800,000	99.30 %	300,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,000,000	0	0	22,600,000	22,600,000	94.17 %	1,400,000
111.TM PODCAST	5,100,000	0	0	2,800,000	2,800,000	54.90 %	2,300,000
521211 Belanja Bahan	900,000	0	0	0	0	0.00 %	900,000
522151 Belanja Jasa Profesi	4,200,000	0	0	2,800,000	2,800,000	66.67 %	1,400,000
111.TN PELATIHAN JURNALISTIK PPK DAN KPU	56,175,000	0	0	55,175,000	55,175,000	98.22 %	1,000,000
521211 Belanja Bahan	1,150,000	0	0	150,000	150,000	13.04 %	1,000,000
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	100.00 %	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	51,425,000	0	0	51,425,000	51,425,000	100.00 %	0
111.TO SOSIALISASI PARTISIPASI RENDAH, RAWAN BENCANA DAN	104,800,000	0	0	79,250,000	79,250,000	75.62 %	25,550,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
 Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 4 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
111.TO PENYANDANG DISABILITAS KEPADA TOKMAS	104,800,000	0			79,250,000	75.62 %	25,550,000
521211 Belanja Bahan	66,600,000	0	0	50,300,000	50,300,000	75.53 %	16,300,000
522141 Belanja Sewa	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
522151 Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28,000,000	0	0	21,750,000	21,750,000	77.68 %	6,250,000
111.TP BIMTEK SIKADEKA	32,155,000	0	12,000,000	18,500,000	30,500,000	94.85 %	1,655,000
521211 Belanja Bahan	1,300,000	0	250,000	0	250,000	19.23 %	1,050,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,855,000	0	11,750,000	18,500,000	30,250,000	98.04 %	605,000
QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	8,007,000	0	6,936,000	150,000	7,086,000	88.50 %	921,000
112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	8,007,000	0	6,936,000	150,000	7,086,000	88.50 %	921,000
112.0A SOSIALISASI KEBUJUKAN/REGULASI KPU	6,007,000	0	4,936,000	150,000	5,086,000	84.67 %	921,000
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	996,000	0	996,000	99.60 %	4,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,407,000	0	3,340,000	150,000	3,490,000	79.19 %	917,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00 %	0
112.0B PENGELOLAAN JDIH	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00 %	0
RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,478,000	0	3,139,000	0	3,139,000	48.46 %	3,339,000
RAN.001 Sarana IT Pemilu	6,478,000	0	3,139,000	0	3,139,000	48.46 %	3,339,000
110 Pengelolaan Sarana IT KPU	6,478,000	0	3,139,000	0	3,139,000	48.46 %	3,339,000
110.0A Pengelolaan Sarana IT KPU	6,478,000	0	3,139,000	0	3,139,000	48.46 %	3,339,000
521211 Belanja Bahan	6,478,000	0	3,139,000	0	3,139,000	48.46 %	3,339,000
CQ.6710 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	193,307,000	0	191,887,000	0	191,887,000	99.27 %	1,420,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	193,307,000	0	191,887,000	0	191,887,000	99.27 %	1,420,000
QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	193,307,000	0	191,887,000	0	191,887,000	99.27 %	1,420,000
051 Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	193,307,000	0	191,887,000	0	191,887,000	99.27 %	1,420,000
051.0A EVALUASI VERPOL	6,147,000	0	5,635,000	0	5,635,000	91.67 %	512,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
 Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 5 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	2,115,000	0	2,115,000	0	2,115,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,032,000	0	3,520,000	0	3,520,000	87.30 %	512,000
051.0B PEMUTAKHIRAN DATA PARPOL	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00 %	0
051.0F Dukungan Verifikasi Faktual Pencalonan DPD	123,310,000	0	122,502,000	0	122,502,000	99.34 %	808,000
521211 Belanja Bahan	22,160,000	0	22,152,000	0	22,152,000	99.96 %	8,000
522141 Belanja Sewa	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000	100.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58,550,000	0	58,550,000	0	58,550,000	100.00 %	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32,160,000	0	31,360,000	0	31,360,000	97.51 %	800,000
051.0G Dukungan Kegiatan Pemutakhiran data Pemilih Pemilu	58,450,000	0	58,350,000	0	58,350,000	99.83 %	100,000
521211 Belanja Bahan	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,500,000	0	2,400,000	0	2,400,000	96.00 %	100,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	55,750,000	0	55,750,000	0	55,750,000	100.00 %	0
CQ.6867 Pembentukan Badan Adhoc	54,616,162,000	0	45,671,199,500	8,687,996,925	54,359,196,425	99.53 %	256,965,575
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	54,616,162,000	0	45,671,199,500	8,687,996,925	54,359,196,425	99.53 %	256,965,575
QGE.001 Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	2,006,058,000	0	1,749,986,000	237,921,000	1,987,907,000	99.10 %	18,151,000
051 Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	2,006,058,000	0	1,749,986,000	237,921,000	1,987,907,000	99.10 %	18,151,000
051.0A Pelantikan dan Bimtek Badan Adhoc (PPK)	527,866,000	0	527,866,000	0	527,866,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	303,866,000	0	303,866,000	0	303,866,000	100.00 %	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	100.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	100.00 %	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	203,500,000	0	203,500,000	0	203,500,000	100.00 %	0
051.0B Penetapan dan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat Badan Adhoc (Sekretariat PPK)	115,004,000	0	115,004,000	0	115,004,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	3,659,000	0	3,659,000	0	3,659,000	100.00 %	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 6 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	108,385,000	0	108,385,000	0	108,385,000	100.00	0
051.0C Seleksi Tertulis/CAT (PPS)	73,255,000	0	73,255,000	0	73,255,000	100.00	0
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	510,000	0	510,000	0	510,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	28,045,000	0	28,045,000	0	28,045,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44,700,000	0	44,700,000	0	44,700,000	100.00	0
051.0D Seleksi Wawancara Badan Adhoc (PPS)	93,390,000	0	93,390,000	0	93,390,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	32,340,000	0	32,340,000	0	32,340,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	53,550,000	0	53,550,000	0	53,550,000	100.00	0
051.0E Pelantikan Badan Adhoc (PPS)	512,431,000	0	512,431,000	0	512,431,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	84,191,000	0	84,191,000	0	84,191,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	198,500,000	0	198,500,000	0	198,500,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,940,000	0	14,940,000	0	14,940,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	214,800,000	0	214,800,000	0	214,800,000	100.00	0
051.0F Bimtek PPS dan Sekretariat PPS Pemilu 2024	418,440,000	0	418,440,000	0	418,440,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	87,990,000	0	87,990,000	0	87,990,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	295,450,000	0	295,450,000	0	295,450,000	100.00	0
051.0G Dukungan Operasional Tahapan Lainnya	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	100.00	0
051.TJ Tambahan Seleksi_KPPS	109,917,000	0	0	91,766,000	91,766,000	83.49 %	18,151,000
521211 Belanja Bahan	25,467,000	0	0	17,606,000	17,606,000	69.13 %	7,861,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,000,000	0	0	19,710,000	19,710,000	65.70 %	10,290,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	54,450,000	0	0	54,450,000	54,450,000	100.00	0
051.TK Dukungan tahapan	146,155,000	0	0	146,155,000	146,155,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	95,305,000	0	0	95,305,000	95,305,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 7 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	50,850,000	0	0	50,850,000	50,850,000	100.00	0
QGE.002 Honorarium Badan Adhoc	42,436,846,000	0	36,167,500,000	6,267,800,000	42,435,300,000	100.00	1,546,000
051 Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	42,436,846,000	0	36,167,500,000	6,267,800,000	42,435,300,000	100.00	1,546,000
051.0A Honorarium Badan Adhoc	23,815,750,000	0	23,833,750,000	182,000,000	23,815,750,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	23,815,750,000	0	23,833,750,000	182,000,000	23,815,750,000	100.00	0
051.TB Tambahan SABA BUN Honor Adhoc	17,711,400,000	0	12,533,750,000	5,176,104,000	17,709,854,000	99.99 %	1,546,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	17,711,400,000	0	12,533,750,000	5,176,104,000	17,709,854,000	99.99 %	1,546,000
051.TC Tambahan Honor	909,696,000	0	0	909,696,000	909,696,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	909,696,000	0	0	909,696,000	909,696,000	100.00	0
QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc	10,173,258,000	0	7,753,713,500	2,182,275,925	9,935,989,425	97.67 %	237,268,575
051 Dukungan Operasional Badan Adhoc	10,173,258,000	0	7,753,713,500	2,182,275,925	9,935,989,425	97.67 %	237,268,575
051.0A Dukungan Operasional Badan Adhoc	5,048,744,000	0	5,048,743,500	0	5,048,743,500	100.00	500
521211 Belanja Bahan	174,100,000	0	174,100,000	0	174,100,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,874,644,000	0	4,874,643,500	0	4,874,643,500	100.00	500
051.0B Dukungan Operasional Pantalih	1,001,724,000	0	1,001,720,000	0	1,001,720,000	100.00	4,000
521211 Belanja Bahan	1,001,724,000	0	1,001,720,000	0	1,001,720,000	100.00	4,000
051.0C Santunan Kecelakaan Kerja Badan Ad hoc	102,250,000	0	102,250,000	0	102,250,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	102,250,000	0	102,250,000	0	102,250,000	100.00	0
051.TC Tambahan Operasional	2,454,000,000	0	1,601,000,000	853,000,000	2,454,000,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	901,100,000	0	594,900,000	306,200,000	901,100,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,552,900,000	0	1,006,100,000	546,800,000	1,552,900,000	100.00	0
051.TD Tambahan Anggaran Bimtek PPK dan PPS	1,038,160,000	0	0	830,268,725	830,268,725	79.98 %	207,891,275
521211 Belanja Bahan	211,985,000	0	0	133,108,725	133,108,725	62.79 %	78,876,275
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	826,175,000	0	0	697,160,000	697,160,000	84.38 %	129,015,000
051.TE BIMTEK PERTANGGUNGJAWABAN BADAN ADHOC	102,880,000	0	0	87,700,000	87,700,000	85.24 %	15,180,000
521211 Belanja Bahan	31,240,000	0	0	30,225,000	30,225,000	96.75 %	1,015,000
522151 Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0	0	0	0	0.00 %	5,400,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 8 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66,240,000	0	0	57,475,000	57,475,000	86.77 %	8,765,000
051.TF Pembentukan KPSS	329,050,000	0	0	329,050,000	329,050,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	288,150,000	0	0	288,150,000	288,150,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	40,900,000	0	0	40,900,000	40,900,000	100.00	0
051.TG Dukungan Tahapan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dan, Simulasi Sirekap	96,450,000	0	0	82,257,200	82,257,200	85.28 %	14,192,800
521211 Belanja Bahan	48,000,000	0	0	39,857,200	39,857,200	83.04 %	8,142,800
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	24,100,000	0	0	21,600,000	21,600,000	89.63 %	2,500,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,850,000	0	0	16,300,000	16,300,000	82.12 %	3,550,000
CQ.6870 Masa Kampanye Pemilu	56,890,000	0	18,014,900	6,860,000	24,874,900	43.72 %	32,015,100
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	56,890,000	0	18,014,900	6,860,000	24,874,900	43.72 %	32,015,100
QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu	19,959,000	0	17,644,900	0	17,644,900	88.41 %	2,314,100
051 Persiapan Kampanye Pemilu	19,959,000	0	17,644,900	0	17,644,900	88.41 %	2,314,100
051.0A Persiapan Kampanye Pemilu	19,959,000	0	17,644,900	0	17,644,900	88.41 %	2,314,100
521211 Belanja Bahan	3,527,000	0	1,575,000	0	1,575,000	44.66 %	1,952,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,432,000	0	16,069,900	0	16,069,900	97.80 %	362,100
QGE.002 Pengelolaan Kampanye Pemilu	35,836,000	0	370,000	6,860,000	7,230,000	20.18 %	28,606,000
051 Pengelolaan Kampanye Pemilu	35,836,000	0	370,000	6,860,000	7,230,000	20.18 %	28,606,000
051.0A Pengelolaan Kampanye Pemilu	35,836,000	0	370,000	6,860,000	7,230,000	20.18 %	28,606,000
521211 Belanja Bahan	25,836,000	0	0	6,860,000	6,860,000	26.55 %	18,976,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,000,000	0	370,000	0	370,000	3.70 %	9,630,000
QGE.003 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1,095,000	0	0	0	0	0.00 %	1,095,000
051 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1,095,000	0	0	0	0	0.00 %	1,095,000
051.0A Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1,095,000	0	0	0	0	0.00 %	1,095,000
521211 Belanja Bahan	1,095,000	0	0	0	0	0.00 %	1,095,000
CQ.6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	3,988,997,000	0	2,596,197,732	889,082,200	3,485,279,932	87.37 %	503,717,068

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 9 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	3,988,997,000	0	2,596,197,732	889,082,200	3,485,279,932	87.37 %	503,717,068
QGE.001 Penyediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1,412,625,000	0	989,962,500	233,887,200	1,223,849,700	86.64 %	188,775,300
051 Penyediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1,412,625,000	0	989,962,500	233,887,200	1,223,849,700	86.64 %	188,775,300
051.0A Penyediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	165,313,000	0	14,187,000	136,711,000	150,898,000	91.28 %	14,415,000
521211 Belanja Bahan	23,325,000	0	3,837,000	8,451,000	12,288,000	52.68 %	11,037,000
522151 Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0	0	3,600,000	3,600,000	66.67 %	1,800,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,488,000	0	10,350,000	0	10,350,000	98.68 %	138,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	126,100,000	0	0	124,660,000	124,660,000	98.86 %	1,440,000
051.TL Penyediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1,247,312,000	0	975,775,500	97,176,200	1,072,951,700	86.02 %	174,360,300
521211 Belanja Bahan	56,005,000	0	16,785,000	8,320,000	25,105,000	44.83 %	30,900,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	105,100,000	0	6,620,000	20,586,700	27,206,700	25.89 %	77,893,300
522141 Belanja Sewa	910,000,000	0	910,000,000	0	910,000,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	53,450,000	0	12,500,000	40,950,000	53,450,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	105,995,000	0	15,620,500	27,319,500	42,940,000	40.51 %	63,055,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16,762,000	0	14,260,000	0	14,260,000	85.01 %	2,502,000
QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2,480,271,000	0	1,605,735,232	655,195,000	2,260,930,232	91.16 %	219,340,768
051 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2,480,271,000	0	1,605,735,232	655,195,000	2,260,930,232	91.16 %	219,340,768
051.0A Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia	1,057,271,000	0	183,619,300	655,195,000	838,814,300	79.34 %	218,456,700
521211 Belanja Bahan	3,366,000	0	3,327,000	0	3,327,000	98.84 %	39,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	42,300,000	0	21,150,000	21,150,000	42,300,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	232,717,000	0	34,316,400	0	34,316,400	14.75 %	198,400,600
522191 Belanja Jasa Lainnya	95,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,488,000	0	29,825,900	400,000	30,225,900	99.14 %	262,100
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	653,400,000	0	0	633,645,000	633,645,000	96.98 %	19,755,000
051.0B Dukungan Sosialisasi	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
051.TL Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,403,000,000	0	1,402,115,932	0	1,402,115,932	99.94 %	884,068

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 10 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,403,000,000	0	1,402,115,932	0	1,402,115,932	99.94 %	884,068
QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	96,101,000	0	500,000	0	500,000	0.52 %	95,601,000
051 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	96,101,000	0	500,000	0	500,000	0.52 %	95,601,000
051.0A Pengelolaan Dokumentasi Logistik	1,000,000	0	500,000	0	500,000	50.00 %	500,000
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	500,000	0	500,000	50.00 %	500,000
051.TL Pengelolaan Dokumentasi Logistik	95,101,000	0	0	0	0	0.00 %	95,101,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	95,101,000	0	0	0	0	0.00 %	95,101,000
CQ.6872 Pemungutan dan Penghitungan Suara	42,451,000	0	40,954,000	0	40,954,000	96.47 %	1,497,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	42,451,000	0	40,954,000	0	40,954,000	96.47 %	1,497,000
QGE.001 Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	42,165,000	0	40,954,000	0	40,954,000	97.13 %	1,211,000
051 Fasilitas penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	42,165,000	0	40,954,000	0	40,954,000	97.13 %	1,211,000
051.0A Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	42,165,000	0	40,954,000	0	40,954,000	97.13 %	1,211,000
521211 Belanja Bahan	3,963,000	0	2,752,700	0	2,752,700	69.46 %	1,210,300
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,747,000	0	9,746,300	0	9,746,300	99.99 %	700
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24,855,000	0	24,855,000	0	24,855,000	100.00 %	0
QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	191,000	0	0	0	0	0.00 %	191,000
051 Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	191,000	0	0	0	0	0.00 %	191,000
051.0A Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	191,000	0	0	0	0	0.00 %	191,000
521211 Belanja Bahan	191,000	0	0	0	0	0.00 %	191,000
QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	95,000	0	0	0	0	0.00 %	95,000
051 Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	95,000	0	0	0	0	0.00 %	95,000
051.0A Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	95,000	0	0	0	0	0.00 %	95,000
521211 Belanja Bahan	95,000	0	0	0	0	0.00 %	95,000
CQ.6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	169,673,000	0	166,213,800	600,000	166,813,800	98.31 %	2,859,200
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	169,673,000	0	166,213,800	600,000	166,813,800	98.31 %	2,859,200

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 11 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	20,809,000	0	20,507,500	150,000	20,657,500	99.27 %	151,500
051 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	20,809,000	0	20,507,500	150,000	20,657,500	99.27 %	151,500
051.0A Bimtek, Rapat Koordinasi, Rapat Pleno Terbuka	20,809,000	0	20,507,500	150,000	20,657,500	99.27 %	151,500
521211 Belanja Bahan	5,278,000	0	5,277,000	0	5,277,000	99.98 %	1,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,531,000	0	12,530,500	0	12,530,500	100.00 %	500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	0	2,700,000	150,000	2,850,000	95.00 %	150,000
QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih	138,070,000	0	135,051,300	450,000	135,501,300	98.14 %	2,568,700
051 Pemutakhiran Data Pemilih	138,070,000	0	135,051,300	450,000	135,501,300	98.14 %	2,568,700
051.0A Pemutakhiran Data Pemilih	7,850,000	0	7,850,000	0	7,850,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00 %	0
051.TA Dukungan Pelaksanaan Penetapan DPT	128,000,000	0	124,981,300	450,000	125,431,300	97.99 %	2,568,700
521211 Belanja Bahan	45,276,000	0	43,746,500	0	43,746,500	96.62 %	1,529,500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
522141 Belanja Sewa	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,199,000	0	32,084,800	450,000	32,534,800	98.00 %	664,200
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45,024,000	0	44,850,000	0	44,850,000	99.17 %	374,000
051.TB Dukungan Kegiatan Rakor DPSHP	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	2,220,000	0	2,220,000	0	2,220,000	100.00 %	0
QGE.003 Penetapan Data Pemilih	10,794,000	0	10,655,000	0	10,655,000	98.71 %	139,000
051 Penetapan Data Pemilih	10,794,000	0	10,655,000	0	10,655,000	98.71 %	139,000
051.0A Penetapan Data Pemilih	10,794,000	0	10,655,000	0	10,655,000	98.71 %	139,000
521211 Belanja Bahan	10,794,000	0	10,655,000	0	10,655,000	98.71 %	139,000
CQ.6888 Penetapan Peserta Pemilu	8,240,000	0	0	3,230,000	3,230,000	39.20 %	5,010,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	8,240,000	0	0	3,230,000	3,230,000	39.20 %	5,010,000
QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	8,240,000	0	0	3,230,000	3,230,000	39.20 %	5,010,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 12 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	8,240,000	0	0	3,230,000	3,230,000	39.20 %	5,010,000
051.TJ Tambahan Revisi 7	8,240,000	0	0	3,230,000	3,230,000	39.20 %	5,010,000
521211 Belanja Bahan	8,240,000	0	0	3,230,000	3,230,000	39.20 %	5,010,000
CQ.6889 Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	32,208,000	0	31,587,500	0	31,587,500	98.07 %	620,500
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	32,208,000	0	31,587,500	0	31,587,500	98.07 %	620,500
QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	9,725,000	0	9,419,500	0	9,419,500	96.86 %	305,500
051 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	9,725,000	0	9,419,500	0	9,419,500	96.86 %	305,500
051.0A PENETAPAN DAN SOSIALISASI DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI	9,725,000	0	9,419,500	0	9,419,500	96.86 %	305,500
521211 Belanja Bahan	4,835,000	0	4,529,500	0	4,529,500	93.68 %	305,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,890,000	0	4,890,000	0	4,890,000	100.00 %	0
QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	12,875,000	0	12,763,000	0	12,763,000	99.13 %	112,000
051 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	12,875,000	0	12,763,000	0	12,763,000	99.13 %	112,000
051.0A Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	12,875,000	0	12,763,000	0	12,763,000	99.13 %	112,000
521211 Belanja Bahan	7,975,000	0	7,863,000	0	7,863,000	98.60 %	112,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,900,000	0	4,900,000	0	4,900,000	100.00 %	0
QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	9,608,000	0	9,405,000	0	9,405,000	97.89 %	203,000
051 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	9,608,000	0	9,405,000	0	9,405,000	97.89 %	203,000
051.0A Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	9,608,000	0	9,405,000	0	9,405,000	97.89 %	203,000
521211 Belanja Bahan	2,128,000	0	1,925,000	0	1,925,000	90.46 %	203,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,480,000	0	7,480,000	0	7,480,000	100.00 %	0
CQ.6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	262,434,000	0	235,847,200	0	235,847,200	89.87 %	26,586,800
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	262,434,000	0	235,847,200	0	235,847,200	89.87 %	26,586,800
QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	94,775,000	0	93,664,000	0	93,664,000	98.83 %	1,111,000
051 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	94,775,000	0	93,664,000	0	93,664,000	98.83 %	1,111,000
051.0A PENCALONAN ANGGOTA DPD	94,775,000	0	93,664,000	0	93,664,000	98.83 %	1,111,000
521211 Belanja Bahan	21,510,000	0	20,399,000	0	20,399,000	94.83 %	1,111,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 13 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	30,950,000	0	30,950,000	0	30,950,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,865,000	0	4,865,000	0	4,865,000	100.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37,450,000	0	37,450,000	0	37,450,000	100.00 %	0
QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan	149,539,000	0	127,523,200	0	127,523,200	85.28 %	22,015,800
051 Pelaksanaan Proses Pencalonan	149,539,000	0	127,523,200	0	127,523,200	85.28 %	22,015,800
051.0A Persiapan Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota	18,372,000	0	18,002,500	0	18,002,500	97.99 %	369,500
521211 Belanja Bahan	9,267,000	0	8,897,500	0	8,897,500	96.01 %	369,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,105,000	0	9,105,000	0	9,105,000	100.00 %	0
051.0B PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	116,167,000	0	109,520,700	0	109,520,700	94.28 %	6,646,300
521211 Belanja Bahan	25,295,000	0	18,649,000	0	18,649,000	73.73 %	6,646,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	52,500,000	0	52,500,000	0	52,500,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,672,000	0	26,671,700	0	26,671,700	100.00 %	300
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,700,000	0	11,700,000	0	11,700,000	100.00 %	0
051.TJ Tambahan APK_BK	15,000,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,000,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000,000
QGE.003 Evaluasi Pencalonan	18,120,000	0	14,660,000	0	14,660,000	80.91 %	3,460,000
051 Evaluasi Pencalonan	18,120,000	0	14,660,000	0	14,660,000	80.91 %	3,460,000
051.0A Evaluasi Pencalonan	18,120,000	0	14,660,000	0	14,660,000	80.91 %	3,460,000
521211 Belanja Bahan	2,000,000	0	1,945,000	0	1,945,000	97.25 %	55,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,120,000	0	12,715,000	0	12,715,000	78.88 %	3,405,000
WA Program Dukungan Manajemen	2,258,859,000	0	2,176,035,029	73,216,449	2,249,251,478	99.57 %	9,607,522
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,210,699,000	0	2,127,875,429	73,216,449	2,201,091,878	99.57 %	9,607,122
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,180,406,000	0	2,098,782,929	72,016,449	2,170,799,378	99.56 %	9,606,622
EBA.994 Layanan Perkantoran	2,180,406,000	0	2,098,782,929	72,016,449	2,170,799,378	99.56 %	9,606,622
001 Gaji dan Tunjangan	2,180,406,000	0	2,098,782,929	72,016,449	2,170,799,378	99.56 %	9,606,622
001.0A Gaji dan Tunjangan	1,402,775,000	0	1,321,152,529	72,016,449	1,393,168,978	99.32 %	9,606,022
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	539,628,000	0	524,104,800	14,920,300	539,025,100	99.89 %	602,900

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 14 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,000	0	6,672	187	6,859	68.59 %	3,141
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	45,253,000	0	44,150,760	1,101,880	45,252,640	100.00	360
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	15,380,000	0	15,018,392	361,100	15,379,492	100.00	508
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0	45,000,000	2,880,000	47,880,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	453,000	0	438,600	14,341	452,941	99.99 %	59
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	39,397,000	0	38,527,440	869,040	39,396,480	100.00	520
511129 Belanja Uang Makan PNS	71,267,000	0	57,214,000	6,985,000	64,199,000	90.08 %	7,068,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	17,710,000	0	17,710,000	0	17,710,000	100.00	0
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	625,796,000	0	578,981,865	44,884,601	623,866,466	99.89 %	1,929,534
001.0B Uang Kehormatan	777,631,000	0	777,630,400	0	777,630,400	100.00	600
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	777,631,000	0	777,630,400	0	777,630,400	100.00	600
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	30,293,000	0	29,092,500	1,200,000	30,292,500	100.00	500
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	30,293,000	0	29,092,500	1,200,000	30,292,500	100.00	500
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	30,293,000	0	29,092,500	1,200,000	30,292,500	100.00	500
005.0A Penyusunan Laporan Keuangan Tahapan Pemilihan dan Tahapan Pemilu Tahun 2024	11,922,000	0	11,921,500	0	11,921,500	100.00	500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,322,000	0	8,321,500	0	8,321,500	99.99 %	500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
005.0B PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	18,371,000	0	17,171,000	1,200,000	18,371,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	7,200,000	0	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	5,340,000	0	5,340,000	0	5,340,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,831,000	0	5,831,000	0	5,831,000	100.00	0
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	41,360,000	0	41,359,600	0	41,359,600	100.00	400
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	41,360,000	0	41,359,600	0	41,359,600	100.00	400
EBA.994 Layanan Perkantoran	41,360,000	0	41,359,600	0	41,359,600	100.00	400
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	41,360,000	0	41,359,600	0	41,359,600	100.00	400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 417882 KPU KABUPATEN PANDEGLANG

Hal 15 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0A Layanan Perkantoran	41,360,000	0	41,359,600	0	41,359,600	100.00	400
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	40,620,000	0	40,619,600	0	40,619,600	100.00	400
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	740,000	0	740,000	0	740,000	100.00	0
WA.6634 Data dan Informasi	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000	100.00	0
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000	100.00	0
EBA.963 Layanan Data dan Informasi	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000	100.00	0
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000	100.00	0
005.0A Layanan Data dan Informasi	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	100.00	0

BAB IV

PENUTUP

- A. Kesimpulan Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabuten Pandeglang Selatan sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
- B. Saran Untuk mengoptimalkan peningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabuten Pandeglang Selatan, berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :
1. Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/pelatihan formal maupun non formal, antara lain untuk memenuhi kualifikasi pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepemiluan;
 4. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang akan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegritas dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun system pengukuran data kinerja secara berkelanjutan, sehingga anggaran berbasis kinerja dapat mewujudkan serta memanfaatkan laporan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bahan untuk meningkatkan kinerja.

Pandeglang, 25 Januari 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**
Sekretaris,



MOHAMAD RUKBI